



BPR SYARIAH
HIK MCI

GRUP HIK



Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025

PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH MITRA CAHAYA INDONESIA

BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPRS HIK MCI

Alamat : Jalan Kaliurang KM 09, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta

No. Telepon : (0274) 881159

A. Penjelasan Umum

Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa pada saat ini. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua bagian yang ada pada bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank. Suatu bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya risiko yang dihadapi bank dan akan mengakibatkan kerugian pada bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada bank (*stakeholders*).

PT BPRS HIK MCI dalam meningkatkan kinerja Bank melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang dijelaskan dalam POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Regulasi mewajibkan bank melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh aspek atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), professional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *stakeholders* sehingga PT BPRS HIK MCI dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan secara berkala dan meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
5. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
6. Penangan Benturan Kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
10. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
13. Rencana Bisnis BPR Syariah

B. Tujuan Penerapan Tata Kelola

1. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perundang-Undangan, dan Prinsip Syariah.

2. Meningkatkan kinerja dan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, professional, dan kewajaran dalam pengelolaan BPRS HIK MCI.
3. Menarik minat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS HIK MCI.

C. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan oleh PT BPRS HIK MCI

Prinsip-prinsip tata kelola di PT BPRS HIK MCI sebagaimana POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, didasarkan pada 5 (lima) prinsip antara lain sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan baik.
4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kholid	Direktur Utama	1. Mewakili BPRS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS. 2. Memimpin dan mengelola BPRS hingga tercapai tujuan BPRS. 3. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan anggaran dasar, dan Keputusan RUPS. 4. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPRS, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. 5. Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko. 6. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja

			atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPRS dan auditor ekstern. 7. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya: a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independent terhadap unit kerja lain. 8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 9. Mengungkapkan kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 10. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai 11. Menyediakan data dan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
--	--	--	--

2.	Mushoniful Agustian	Direktur Operasional dan Kepatuhan	1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. 5. melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
----	------------------------	--	--

			6. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. 7. memastikan kegiatan usaha BPRS memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
--	--	--	---

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris & DPS
Direksi sudah menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dede Haris Sumarno, S.E., M.M.	Komisaris Utama	1. Dewan Komisaris memastikan penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan
2.	Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.	Komisaris	

			mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS. b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. 5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan
--	--	--	--

			ketentuan peraturan perundang-undangan.
			6. Dewan Komisaris melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
			a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau
			b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS.

Rekomendasi Kepada Direksi
Rekomendasi dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi tercantum dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Radirkom)

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si.Ak., SAS., CA., CPA.	Ketua DPS	1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengawasi proses pengembangan produk-produk baru BPRS agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
2.	Toto Suparwoto, S.Pd.	Anggota DPS	

			3. Melakukan pengawasan untuk kepentingan BPRS atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPRS. 4. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 7. Dalam melakukan pengawasan, DPS mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPRS termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPRS yang terkait
--	--	--	---

			dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS 8. DPS melaporkan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK. 9. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
--	--	--	---

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
DPS memberikan rekomendasi dan saran dalam rapat koordinasi maupun secara personal ke Direksi

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
403/HIKMCI/DIR/VII/2025	31 Juli 2025	053/HIKMCI/DIR/I/2026	30 Januari 2026

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	-	-	-	-
2.	Komite Pemantau Risiko	-	-	-	-

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	-	-	-	-
----	--------------------------------	---	---	---	---

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS HIK MCI

Tahun : 2025

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Predikat Komposit
1,25	Sangat Baik
Analisa	
- PT BPRS HIK MCI telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta anggota Direksi sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. - PT BPRS HIK MCI telah memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta anggota Dewan Komisaris sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. - PT BPRS HIK MCI telah memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. - Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan, PT BPRS HIK MCI sudah mendapatkan opini dari DPS dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. - PT BPRS HIK MCI sudah memiliki Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan beserta Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, serta memiliki Satuan Kerja Audit Intern. - PT BPRS HIK MCI telah memiliki kebijakan mengenai manajemen risiko dan penetapan limit risiko. - PT BPRS HIK MCI sudah memiliki kebijakan mengenai batas maksimum penyaluran dana (BMPD). - PT BPRS HIK MCI telah menyusun rencana bisnis (RBB) BPRS dan sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	

- PT BPRS HIK MCI telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sleman, 09 April 2026

PT BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia

Menyetujui

Direksi



Kholid, S.Pd, M.M.
Direktur Utama

Mengetahui

Dewan Komisaris



Dede Haris Sumarno, S.E, M.M.
Komisaris Utama

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS HIK MCI		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kholid	-	-	-	-
2.	Mushoniful Agustian	-	-	-	-

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS HIK MCI

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No.	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS HIK MCI

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS HIK MCI		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec	1.582.200.000	8,15	-	-

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah pada BPRS HIK MCI

No	Nama Anggota DPS	Kepemilikan Saham			
		BPRS HIK MCI		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Toto Suparwoto, S.Pd	100.000.000	0,52%	BPR Syariah Formes	2,08%

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS HIK MCI

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Nihil				

H. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1.	Dede Haris Sumarno, S.E, M.M	Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah	Direktur Utama

I. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No	Nama Anggota DPS	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1.	Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si.Ak., SAS., CA., CPA	BPRS Barokah Dana Sejahtera	Anggota Dewan Pengawas Syariah
		Dapen Syariah Muhammadiyah	Anggota Dewan Pengawas Syariah
2.	Toto Suparwoto, S.Pd	BPRS Cahaya Hidup	Anggota Dewan Pengawas Syariah

J. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A.	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	2	965.442.612	2	482.721.324	2	241.360.656

2.	Tunjangan	2	145.920.000	2	72.960.000	2	35.730.000
3.	Tantiem	2	209.241.029	2	104.620.515	2	52.310.257
4.	Bonus						
5.	Kompensasi berbasis saham						
6.	Remunerasi lainnya	2	320.565.315	2	170.738.742	2	63.293.084
	Total Remunerasi		1.641.168.956		831.040.581		392.693.997
B.	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan						
2.	Transportasi						
3.	Asuransi Kesehatan	2	296.618.00		8.107.100		11.850.700
4.	Fasilitas Lain	2	70.907.215				
	Total Fasilitas Lain		100.569.015		8.107.100		11.850.700
C.	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.741.737.971		839.147.681		404.544.697

K. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	3.62
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.11

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.11
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.11
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0.50
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	5.07

L. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	6 Maret 2025	4	Peningkatan Sumber Daya Insani BPRS
2.	3 Juni 2025	4	Progres Marger dibawah PSP Dana Pensiun Muhammadiyah
3.	23 September 2025	4	Skema sewa Al Azhar
4.	6 November 2025	6	Pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI
5.	19 November 2025	8	Pembahasan terkait Follow Up Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI
6.	27 November 2025	4	Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT BPRS HIK MCI Tahun 2025

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonfrensi	
1.	Dede Haris Sumarno, S.E, M.M.	6	0	100%
2.	Prof Dr Edy Suandi Hamid, M. Ec	6	0	100%

M. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	23 Januari 25	7	1. Komposisi Pendanaan di BPRS HIK MCI. 2. Peningkatan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah 3. Hasil pemeriksaan DPS atas sampling pembiayaan dan Pendanaan
2.	18 Maret 2025	5	1. Pembahasan terkait dengan pelaksanaan akad Murabahah. 2. Kendala dalam bukti kepemilikan barang pada akad Murabahah. 3. Pelaksanaan tata kelola syariah BPRS 4. Hasil pemeriksaan DPS atas sampling pembiayaan dan Pendanaan
3.	22 Mei 2025	6	1. Pembahasan Penyusunan Pedoman Tata Kelola dan Tata Tertib DPS 2. Opini DPS terkait dengan rencana kerjasama dana talangan pelunasan BJS
4.	24 Juli 2025	3	Pembahasan temuan Pemeriksaan DPS Semester 1 tahun 2025
5.	24 Oktober 2025	5	Pembahasan Akad MMQ

6.	27 November 2025	5	1. Opini DPS terkait dengan sewa Gedung Baru milik HIK MCI (Gedung ex Al Azhar Kairo) 2. Pemanfaatan aset milik MCI
----	------------------	---	--

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonfrensi	
1.	Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si.Ak., SAS., CA., CPA	6	0	100%
2.	Toto Suparwoto, S.Pd	6	0	100%

N. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Intern	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

O. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

P. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Q. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah
1.	06 Januari 2025	Sosial	Memberikan bantuan dana untuk kegiatan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal PCM Tempel	Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal PCM Tempel	Rp 1.000.000,-
2.	13 Januari 2025	Sosial	Memberikan bantuan dana untuk kegiatan Lazismu DIY	Lazismu DIY	Rp 2.000.000,-

3.	06 Januari 2025	Sosial	Kegiatan Try Out 2025	SMP Muhammadiyah 1 Prambanan	Rp 500.000,-
4.	22 Januari 2025	Sosial	Kegiatan Fun Try Out	SMP Muhammadiyah 3 Depok	Rp 700.000,-
5.	22 Januari 2025	Sosial	Kegiatan Milad SMP Muhammadiyah 1 Sleman	SMP Muhammadiyah 1 Sleman	Rp 500.000,-
6.	24 Januari 2025	Sosial	Kegiatan Milad PT BPRS Bangun Drajat Warga Ke 31	PT BPRS Bangun Drajat Warga Ke 31	Rp 1.500.000,-
7.	31 Januari 2025	Sosial	Kegiatan Srikandi Kreatif Indonesia	DPP Persikindo	Rp 5.000.000,-
8.	19 Februari 2025	Sosial	Memberikan bantuan MCK Pondok Pesantren Al Furqon Desa Sinarjaya Kec. Bungbulang, Garut	Yayasan Barokatul Huda (YABARDA) Pondok Pesantren Al Furqon	Rp 500.000,-
9.	20 Februari 2025	Sosial	Kegiatan Safari Tarawih Tingkat Kapanewon dan Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Sleman Kapanewon Ngaglik	Rp 500.000
10.	26 Februari 2025	Sosial	Kegiatan Mubaligh Hijrah Bulan	Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah	Rp 5.000.000

			Ramadhan 1446 H	Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta	
11.	03 Maret 2025	Sosial	Kegiatan Milad Ke-30 Dana Pensiun Syariah DAPERSI	Dana Pensiun Syariah DAPERSI	Rp 750.000
12.	07 Maret 2025	Sosial	Kegiatan Milad UMY Ke 44	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Rp 4.000.000
13.	12 Maret 2025	Sosial	Kegiatan Pengajian Al Quran Al Hijrah Masjid Syuhada	Masjid Syuhada	Rp 4.000.000
14.	12 Maret 2025	Sosial	Kegiatan Dana Sosial atau ZIS	BMT Forsitama	Rp 300.000
15.	12 Maret 2025	Sosial	Memberikan bantuan Kegiatan Nasyiatul Aisyiyah Kapanewon Ngaglik Sleman	Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Kapanewon Ngaglik Sleman	Rp 1.000.000
16.	17 Maret 2025	Sosial	Memberikan bantuan Donasi	Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Karangwaru Yogyakarta	Rp 1.000.000

17.	08 April 2025	Sosial	Memberikan Bantuan kegiatan Dapen UHAMKA	Dapen UHAMKA	Rp 1.500.000
18.	23 April 2025	Sosial	Memberikan bantuan kegiatan PDM Sleman	PDM Kecamatan Ngaglik Sleman	Rp 5.000.000
19.	29 April 2025	Sosial	Kegiatan Sosial Ranting Aisyiyah (PRA) Tamantirto Selatan	Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) Tamantirto Selatan	Rp 1.000.000
20.	07 Mei 2025	Sosial	Kegiatan Hari BPR-BPRS Nasional 2025	DPW PERBARINDO DIY	Rp 1.000.000
21.	07 Mei 2025	Sosial	Kegiatan Wilayah Aisyiyah DIY	Pimpinan Wilayah Aisyiyah DIY	Rp 2.000.000
22.	07 Mei 2025	Sosial	Memberikan Bantuan Dana Kegiatan SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta	SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta	Rp 1.000.000
23.	17 Mei 2025	Sosial	Kegiatan Basic Training JagalMu	Lembaga Pengkajian Pengawasan dan Pendampingan Produk Halal Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Rp 1.500.000

				Kabupaten Sleman	
24.	21 Mei 2025	Sosial	Kegiatan Pentas Seni dan Tutup Tahun Ajaran 2024/2025	KB-TK Taman Bahagia	Rp 500.000
25.	27 Mei 2025	Sosial	Memberikan Bantuan Kegiatan Sponsorship KKN-PPM UGM Gantari Mengwi 2025	KKN-PPM UGM Gantari Mengwi 2025	Rp 1.000.000
26.	27 Mei 2025	Sosial	Kegiatan SPMB/PPDB dan Milad SMP Muhammadiyah 3 Mlati	SMP Muhammadiyah 3 Mlati	Rp 500.000
27.	03 Juni 2025	Sosial	Memberikan Bantuan Kegiatan Darul Ulum Kleben Pondok Pesantren dan MTS Darul Ulum Islamic School	Yayasan Darul Ulum Kleben Pondok Pesantren dan MTS Darul Ulum Islamic School	Rp 500.000
28.	19 Juni 2025	Sosial	Kegiatan FGD Dewan Pengawas Syariah	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp 2.500.000

29.	19 Juni 2025	Sosial	Bantuan Dukungan Materi dan kerjasama Program Jambore Nasional Relawan Muhammadiyah	Lembaga Resiliensi Bencana Pimpinan Muhammadiyah	Rp 5.000.000
30.	30 Juni 2025	Sosial	Kegiatan Forum Komunitas UMKM Kapanewon Sleman	Forum Komunitas UMKM Kapanewon Sleman	Rp 500.000
31.	10 Juli 2025	Sosial	Bantuan Renovasi Mushola Rodhatun Najah		Rp 1.000.000
32.	22 Juli 2025	sosial	Bantuan Pembayaran Tunggalan Biaya Kuliah sebagai Syarat Pendaftaran An Daeng Hatyzal	Universitas Widya Mataram	Rp 2.500.000
33.	20 Agustus 2025	sosial	Santunan Anak Yatim Dalam Rangka 10 Muharam 1447 Bersama	Rumah Yatim Sleman	Rp 8.800.000
34.	25 September 2025	sosial	Dana bantuan Kegiatan Kerjasama	Lazismu DIY	Rp 1.000.000

			Festival Mewarnai		
35.	28 Oktober 2025	sosial	Kegiatan Benchmarking Pendidikan dan Capacity Building SMP Muhammadiyah	Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan	Rp 700.000